



Gerakan Menuju
Smart City
2023

**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI
KOTA CERDAS (SMART CITY) TAHUN 2023**

KOTA SINGKAWANG

(SMART CITY) TAHUN 2023



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 11010 | www.kominfo.go.id

Nomor : B-1385/DJAI/AI.01.04/12/2023 Jakarta, 4 Desember 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi Tahap II
Tahun 2023 Untuk 50 Kota/Kabupaten

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Nomor: B-1004/DJAI/AI.01.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 tentang Undangan Evaluasi Tahap II Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2023, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal terkait kegiatan evaluasi *masterplan* dan *quick win smart city*:

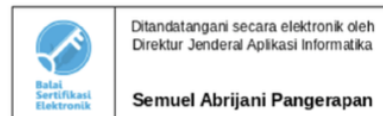
1. Seluruh lima puluh (50) kabupaten/kota yang terpilih pada Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) periode Tahun 2022, mengisi kuesioner (*self-assessment*) *online* pada tautan smartcity.layanan.go.id dan menghadiri kegiatan evaluasi yang telah diselenggarakan pada tanggal 2-16 November 2023 secara daring;
2. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program smart city di lima puluh (50) Kota/Kabupaten terpilih melalui program Gerakan Menuju Smart City 2022, diukur berdasarkan lima (5) dimensi, dengan formulasi perhitungan yang berbeda, yakni:
 - a. Baseline (bobot 10%), menggambarkan penilaian terhadap peraturan untuk menetapkan dokumen masterplan kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kota, aktivitas dewan *smart city* dan tim pelaksana *smart city*, dan realisasi program dan rencana aksi *smart city* di tahun sebelumnya;
 - b. *Output* (bobot 20%), terbentuknya pondasi untuk pelaksanaan program *smart city*, untuk menilai sejauh mana pemerintah kota/kabupaten menyiapkan kebijakan, kelembagaan, serta anggaran untuk program *smart city*;
 - c. *Outcome* (bobot 30%), mencakup pelaksanaan rencana yang ada di *masterplan smart city*, untuk menilai sejauh mana setiap rencana dijalankan oleh pemerintah daerah;



- d. *Impact* (bobot 10%), mencakup manfaat yang dirasakan masyarakat atas implementasi program *smart city*, untuk mengukur manfaat dan perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan program yang telah berjalan; dan
 - e. Program Percepatan atau *Quick Win* (bobot 30%), mencakup tingkat inovasi program percepatan *smart city*, untuk menilai kreativitas dan daya inovasi pada program percepatan (*Quick Win*).
3. Hasil penilaian dari lima dimensi tersebut menjadi Indeks Pencapaian atau Rata-rata Bobot (*performance*) merupakan tingkat pembangunan *smart city* dari masing-masing daerah. Indeks Pencapaian diperoleh dengan menghitung rata-rata *Baseline*, *Output*, *Outcome*, *Impact*, dan *Quick Win*; dan
4. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) dimaksud, dilengkapi dengan masukan dari para asesor yang mendeskripsikan beberapa poin kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi untuk masing-masing kabupaten/kota (sebagaimana terlampir).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika



Semuel Abrijani Pangerapan

Tembusan Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo
3. Sesditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo

Lampiran I

Nomor : B-1385/DJAI/AI.01.04/12/2023

Tanggal : 4 Desember 2023

Kepada Yth.

1	Bupati Banggai	26	Bupati Rembang
2	Bupati Bangka Selatan	27	Bupati Subang
3	Bupati Bekasi	28	Bupati Sukabumi
4	Bupati Bengkulu Utara	29	Bupati Sumbawa Barat
5	Bupati Brebes	30	Bupati Sumedang
6	Bupati Halmahera Selatan	31	Bupati Tabanan
7	Bupati Jembrana	32	Bupati Tapanuli Selatan
8	Bupati Jombang	33	Bupati Trenggalek
9	Bupati Karawang	34	Walikota Bandar Lampung
10	Bupati Katingan	35	Walikota Batam
11	Bupati Klungkung	36	Walikota Bitung
12	Bupati Kotawaringin Timur	37	Walikota Bukittinggi
13	Bupati Kuningan	38	Walikota Dumai
14	Bupati Lima Puluh Kota	39	Walikota Mojokerto
15	Bupati Luwu Utara	40	Walikota Palopo
16	Bupati Magetan	41	Walikota Pangkal Pinang
17	Bupati Majalengka	42	Walikota Pariaman
18	Bupati Maros	43	Walikota Payakumbuh
19	Bupati Mojokerto	44	Walikota Serang
20	Bupati Musi Rawas	45	Walikota Singkawang
21	Bupati Nganjuk	46	Walikota Tanjung Balai
22	Bupati Ngawi	47	Walikota Tasikmalaya
23	Bupati Ogan Komering Ilir	48	Walikota Tebing Tinggi
24	Bupati Penajam Paser Utara	49	Walikota Tegal
25	Bupati Ponorogo	50	Walikota Ternate

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika



Semuel Abrijani Pangerapan

HASIL EVALUASI SMART CITY TAHAP 2 TAHUN 2023

NO	KAB/KOTA	BASELINE (10.00)	OUTPUT (20.00)	OUTCOME (30.00)	IMPACT (10.00)	QUICK WINS (30.00)	NILAI FINAL
1	KAB. BANGGAI	3,72	2,34	3,1	3,35	3,45	3,14
2	KAB. BANGKA SELATAN	2,4	2,03	2,44	2,25	2,2	2,26
3	KAB. BEKASI	3,48	2,34	3	2,7	2,75	2,81
4	KAB. BENGKULU UTARA	1,72	1,49	1,98	1,45	1,95	1,79
5	KAB. BREBES	1	1	2,35	1	1,77	1,64
6	KAB. HALMAHERA SELATAN	2,4	2,31	2,26	2,9	2,62	2,46
7	KAB. JEMBRANA	3,16	2,23	3,21	2,1	2,6	2,72
8	KAB. JOMBANG	3,6	2,89	3,22	3,85	3,7	3,40
9	KAB. KARAWANG	2,8	1,71	2,81	2,4	2,93	2,58
10	KAB. KATINGAN	3,24	2,54	2,79	2,2	2,88	2,75
11	KAB. KLUNGKUNG	2,56	2,17	2,98	2,3	2,42	2,54
12	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	2,4	2,17	2,63	1,6	2,2	2,28
13	KAB. KUNINGAN	2,52	1,6	2,77	2,4	2,87	2,50
14	KAB. LIMA PULUH KOTA	1,6	1,09	2,09	1,05	1,45	1,55
15	KAB. LUWU UTARA	3,28	2,89	2,93	2,2	2,93	2,88
16	KAB. MAGETAN	3,8	2,8	3,28	3,4	3,27	3,25
17	KAB. MAJALENGKA	2,44	1,51	2,76	2,35	2,57	2,38
18	KAB. MAROS	2,88	2,31	2,87	1,65	2,5	2,53
19	KAB. MOJOKERTO	3,52	3,06	3,26	3,2	3,55	3,33
20	KAB. MUSI RAWAS	2,68	2,09	2,36	1,3	1,75	2,05
21	KAB. NGANJUK	3,72	2,77	3,36	3,85	3,53	3,38
22	KAB. NGAWI	3,76	2,57	3,37	2,75	3,03	3,09
23	KAB. OGAN KOMERING ILIR	1,8	1,94	2,36	1,9	1,93	2,05
24	KAB. PENAJAM PASER UTARA	1,6	1,34	1,91	1,6	1,58	1,64
25	KAB. PONOROGO	3,04	2,17	2,38	2,65	2,7	2,53
26	KAB. REMBANG	2,4	1,77	2,64	1,75	2,58	2,34
27	KAB. SUBANG	2,96	2,03	2,76	2,45	3	2,68
28	KAB. SUKABUMI	1,6	1,17	2,21	1,55	2,13	1,85
29	KAB. SUMBAWA BARAT	2,76	2,2	2,92	2,6	3,02	2,76
30	KAB. SUMEDANG	3,12	3,03	2,46	2,35	2,42	2,62
31	KAB. TABANAN	2,76	2	2,75	2	2,28	2,39
32	KAB. TAPANULI SELATAN	2,6	1,77	2,26	1,3	1,6	1,90
33	KAB. TRENGGALEK	3,76	2,94	3,37	3,3	3,7	3,42
34	KOTA BANDAR LAMPUNG	2,44	1,69	2,58	2,2	2,95	2,46
35	KOTA BATAM	2,44	2,06	2,51	2,3	2,37	2,35
36	KOTA BITUNG	3,4	2,06	3,09	3,3	2,98	2,90
37	KOTA BUKITTINGGI	2,12	1,29	2,29	1,8	2,03	1,95
38	KOTA DUMAI	3,56	2,43	2,8	2,55	3,3	2,93
39	KOTA MOJOKERTO	3,76	3,2	3,52	3,8	3,77	3,58
40	KOTA PALOPO	1,8	1,8	2,68	3,25	2,85	2,52
41	KOTA PANGKAL PINANG	1,4	1,31	2,3	1,45	1,32	1,63
42	KOTA PARIAMAN	3,2	2,14	2,99	1,85	2,68	2,63
43	KOTA PAYAKUMBUH	1,88	1,66	2,8	2,1	2,68	2,37
44	KOTA SERANG	3,72	2,14	2,87	3,4	3,45	3,04
45	KOTA SINGKAWANG	2,96	2,49	2,92	1,75	2,25	2,52
46	KOTA TANJUNG BALAI	2,8	2,23	2,25	2,7	2,67	2,47
47	KOTA TASIKMALAYA	3,2	2,37	2,82	3,25	3,47	3,01
48	KOTA TEBING TINGGI	3,36	1,89	2,79	2,5	3,17	2,75
49	KOTA TEGAL	1,92	1,66	2,73	1,7	2,42	2,24
50	KOTA TERNATE	2,04	1,66	2,4	2,5	2,2	2,17

Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahap II Tahun 2023 pada 50 Kota/Kabupaten Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Periode 2022

Gambaran Umum

Pada tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menginisiasi Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas (Smart City) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kantor Staf Presiden untuk menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan kota cerdas di Indonesia.

Pada periode tahun 2017 s.d. 2019, sebanyak 100 (seratus) kota dan kabupaten menerima pendampingan dari para ahli dalam pembuatan masterplan dan penerapan konsep Kota Cerdas (*Smart City*). Program ini kemudian berkembang menjadi Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City). Pada tahun 2021, program ini berfokus pada 48 (empat puluh delapan) kota dan kabupaten yang berada dalam 10 Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) & Kawasan Ibu Kota Negara Baru (IKN). Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 50 (lima puluh) kota dan kabupaten lainnya menerima pendampingan penyusunan Masterplan Kota Cerdas (Smart City). Oleh karena itu, hingga akhir tahun 2023, sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) kota dan kabupaten telah memulai pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan kota cerdas yang didasarkan pada Masterplan Kota Cerdas (Smart City) yang telah disusun.

Selanjutnya, guna mengawal jalannya pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dan juga mengidentifikasi permasalahan serta keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Cerdas (Smart City), maka sejak tahun 2018 telah dilakukan proses evaluasi terhadap implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) yang telah disusun pemerintah kota dan kabupaten. Evaluasi dilakukan tidak hanya mengukur tingkat keberhasilan dan mengidentifikasi adanya masalah dalam pelaksanaan, namun juga untuk dapat memberikan masukan serta saran kepada pemerintah kota dan kabupaten tentang bagaimana sepatutnya proses pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dilaksanakan. Dengan demikian, secara umum hasil evaluasi mencakup penilaian kemajuan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) berdasarkan 5 (lima) dimensi, pengenalan kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Masterplan Kota Cerdas (Smart City), dan saran untuk perbaikan untuk pemerintah kota atau kabupaten.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Evaluasi implementasi Kota Cerdas (Smart City) dilakukan untuk:

1. mengawasi program integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan Kota Cerdas (Smart City) di tingkat pusat dan daerah;
2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan akselerasi dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City) dan RPJMD;
3. memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City) di daerah; dan
4. memantau, mengevaluasi, dan konsultasi atas pelaksanaan dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City) di tingkat pusat dan daerah.

Adapun ruang lingkup evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah gambaran Kondisi awal program Kota Cerdas (baseline), keluaran yang dicapai (*output*), hasil yang diperoleh (*outcome*), dampak yang dirasakan oleh masyarakat (*impact*), serta kelangsungan program percepatan Inovasi (*quick win*).

Metodologi Evaluasi

Objek evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah pelaksanaan program pembangunan Kota Cerdas (Smart City) di daerah yang dinilai berdasarkan *progress* serta hasil yang dicapainya. Adapun metode evaluasi yang dilakukan yakni dengan pengisian form penilaian mandiri (self-assessment) yang kemudian dikonfirmasi kevalidan data dan informasinya dengan metode wawancara oleh para praktisi dan akademisi yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*).

Dimensi dan elemen evaluasi pada tiap-tiap dimensi dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Dimensi	Bobot Penilaian	Elemen	Keterangan
Kondisi awal program Kota Cerdas (Smart City) (Baseline)	10%	Perencanaan	Ketersediaan dokumen legal perencanaan Kota Cerdas (Smart City)
		Realisasi	Sinkronisasi pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dengan RPJMD dan aktivitas kelembagaan Smart City
Dimensi	Bobot	Elemen	Keterangan
Keluaran program Kota Cerdas (Smart City) (Output)	20%	Kebijakan	Ketersediaan peraturan yang mendukung pembangunan Kota Cerdas (Smart City)
		Kelembagaan	Keberadaan dan aktivitas Lembaga pengelola Kota Cerdas (Smart City) (Dewan Kota Cerdas (Smart City) dan Tim Pelaksana Kota Cerdas (Smart City))
		Anggaran	Kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City)
Hasil program Kota Cerdas (Smart City) (Outcome)	30%	Pelaksanaan program/kegiatan/inovasi per dimensi Kota Cerdas (Smart City)	Keterlaksanaan program pembangunan Kota Cerdas (Smart City) pada tiap dimensi di tahun berjalan dibandingkan dengan program yang tertuang pada dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City)
		Pelaksanaan Rencana Aksi	Pelaksanaan rencana aksi yang terkait peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, pengembangan perangkat lunak dan peningkatan literasi
Dampak program Kota Cerdas (Smart City) (Impact)	10%	Perbaikan	Perubahan sebelum dan sesudah implementasi Kota Cerdas (Smart City)
		Keterlibatan Masyarakat	Peran serta masyarakat dalam program Kota Cerdas (Smart City)
Program Quick Win	30%	Pelaksanaan	Perumusan, pelaksanaan dan keberlanjutan Quick Win
		Manajemen Risiko	Identifikasi dan mitigasi risiko terhadap Quick Win

Evaluasi juga dilakukan dengan meninjau beberapa capaian pada aspek berikut ini:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah sejalan dengan konteks pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang peta jalan (*road map*) pelaksanaan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) yang efektif untuk mendukung implementasi pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Road map program/kegiatan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dan rencana aksinya yang sejalan dengan RPJMD;
- Komitmen anggaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) pada keenam dimensi Kota Cerdas (Smart City); Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment;
- Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Wujud/hasil nyata pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Dampak pembangunan Kota Cerdas (Smart City) terhadap birokrasi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2023

A. Baseline

No	Indikator	Subindikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
1	Perencanaan	1.1 Master Plan Smart City yang sudah memiliki payung hukum	1.1.1 Apakah Master Plan Smart City Daerah Anda sudah memiliki payung hukum?	3,00
		1.2 Aktivitas Dewan Smart City	1.2.1 Apakah Dewan Smart City melaksanakan rapat minimal satu kali dalam tahun ini?	1,00
		1.3 Aktivitas Lembaga Pengelola Smart City	1.3.1 Apakah Pengelola Smart city Daerah Anda melaksanakan rapat minimal satu kali dalam tahun ini bersama OPD terkait smart city?	3,00
2	Realisasi	1.1 Realisasi Program Smart City Tahun sebelumnya	1.1.1 Berapa jumlah program smart city yang berjalan di tahun sebelumnya?	4,00
		1.2 Realisasi Rencana Aksi Smart City tahun sebelumnya	1.2.1 Berapa jumlah kegiatan rencana aksi smart city yang berjalan di tahun sebelumnya?	3,80
Rata-Rata				2,96

B. Output

No	Indikator	Subindikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
1	Kebijakan Smart City	2.1 Ketersediaan Peraturan Smart city	2.1.1 Apakah sudah terdapat regulasi berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang smart city sudah tersedia setelah Daerah Anda	3,00

			menjalani Program Gerakan Menuju 100 Smart city?	
2	Kelembagaan Smart city	2.1 Keberlangsungan Fungsi Dewan Smart city	2.1.1 Apakah fungsi Dewan Smart city berjalan saat ini?	1,00
		2.2 Keberlangsungan Fungsi Tim Pelaksana Smart city	2.2.1 Apakah fungsi Tim Pelaksana Smart city sudah berjalan saat ini?	2,00
		2.3 Keterlibatan OPD dalam Program Smart city	2.3.1 Apakah OPD-OPD lain sudah terlibat secara aktif dalam pelaksanaan smart city yang dapat dilihat di dalam program dan kegiatan di dalam Rencana Strategis (Renstra) setiap OPD?	2,20
		2.4 Keberlangsungan Fungsi Forum Smart city Daerah	2.4.1 Apakah Forum Smart city Daerah sudah berjalan dan berkontribusi aktif dalam pelaksanaan smart city di daerah?	2,00
3	Anggaran Smart City	2.1 Ketersediaan Anggaran dari APBD untuk Program Smart city	2.1.1 Berapa persen nilai anggaran smart city dari APBD?	3,60
		2.2 Ketersediaan Anggaran dari Sumber Pembiayaan Alternatif untuk Program Smart city	2.2.1 Se jauh mana pembiayaan alternatif (non-APBD) tersedia untuk membiayai implementasi smart city?	3,60
Rata-Rata				2,49
C. Outcome				
No	Indikator	Subindikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
1	Program	3.1 Program Smart Governance di tahun berjalan	3.1.1 Se jauh mana program smart governance sudah berjalan di tahun ini?	4,00
		3.2 Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.2.1 Se jauh mana kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (Laporan Keuangan Daerah BPK)?	4,00

3.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.3.1 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD Kemendagri)?	1,00
	3.3.2 Berapa nilai SPBE KemanPANRB?	2,00
3.4 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3.4.1 Sejauh mana tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)?	3,00
3.5 Inovasi Pelayanan Publik	3.5.1 Sejauh mana daerah Anda sudah pernah masuk ke dalam peringkat SINOVIK?	1,00
3.6 Program Smart Branding di tahun berjalan	3.6.1 Sejauh mana program smart branding sudah berjalan di tahun ini?	4,00
3.7 Kemudahan Berusaha	3.7.1 Sejauh mana tingkat kemudahan berusaha daerah Anda?	3,80
3.8 Wajah Kota	3.8.1 Sejauh mana visualisasi identitas kota/kabupaten (logo/slogan/maskot) telah ditetapkan dan digunakan?	4,00
3.9 Program Smart Economy di tahun berjalan	3.9.1 Sejauh mana program smart economy sudah berjalan di tahun ini?	4,00
3.10 Kesejahteraan Masyarakat	3.10.1 Sejauh mana persentase penduduk miskin pada (Tahun Terakhir)?	4,00
	3.10.2 Sejauh mana IPM di daerah Anda pada (Tahun Terakhir)?	4,00
3.11 Program Smart Living di tahun berjalan	3.11.1 Sejauh mana program smart living sudah berjalan di tahun ini?	3,00
3.12 Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	3.12.1 Sejauh mana persentase Baduta Stunting yang sudah tertangani 1 tahun terakhir?	4,00
	3.12.2 Sejauh mana persentase Balita sudah mendapatkan imunisasi lengkap dalam 1 tahun terakhir?	1,40

		3.12.3 Se jauh mana cakupan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan dalam 1 tahun terakhir?	2,00
	3.13 Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	3.13.1 Se jauh mana Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (banyaknya rumah tangga dengan akses sumber air minum layak/jumlah rumah tangga) dalam 1 tahun terakhir?	2,00
		3.13.2 Se jauh mana Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak/jumlah rumah tangga) dalam 1 tahun terakhir?	2,00
		3.13.3 Se jauh mana Persentase Jalan (kota/kab) Kondisi Mantap (panjang jalan kondisi mantap/total panjang jalan) dalam 1 tahun terakhir?	4,00
	3.14 Program Smart Society di tahun berjalan	3.14.1 Se jauh mana program smart society sudah berjalan di tahun ini?	3,00
	3.15 Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	3.15.1 Se jauh mana Peta Mutu Pendidikan di kota/kabupaten Anda (rasio penduduk usia wajib belajar 9 tahun banding daya tampung)?	3,00
		3.15.2 Se jauh mana Angka Partisipasi Murni wajib belajar 9 tahun di kota/kabupaten Anda (rasio murid wajib belajar 9 tahun dibanding jumlah penduduk usia wajib belajar)?	2,40
	3.16 Kebencanaan	3.16.1 Se jauh mana pemerintah memiliki program mitigasi (sebelum terjadi) bencana?	4,00
		3.16.2 Se jauh mana pemerintah memiliki program penanganan saat bencana?	2,80
		3.16.3 Se jauh mana pemerintah memiliki program pemulihan setelah bencana?	2,80
	3.17 Program Smart Environment di tahun berjalan	3.17.1 Se jauh mana program smart environment sudah berjalan di tahun ini?	3,00

		3.18 Pengelolaan Sampah	3.18.1 Sejauh mana inovasi pembatasan sampah?	2,00
			3.18.2 Sejauh mana inovasi dalam pengelolaan daur ulang dan guna ulang sampah?	2,00
2	Rencana Aksi	3.1 Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Kapasitas SDM	3.1.1 Sejauh mana rencana aksi pengembangan kapasitas SDM sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	2,00
		3.2 Pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart city	3.2.1 Sejauh mana rencana aksi pengembangan infrastruktur sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	2,00
		3.3 Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Aplikasi Pendukung Smart city	3.3.1 Sejauh mana rencana aksi pengembangan aplikasi pendukung smart city sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	3,60
		3.4 Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Literasi Smart city	3.4.1 Sejauh mana rencana aksi pengembangan literasi smart city sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	3,60
Rata-rata				2,92
D. Impact				
No	Indikator	Subindikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
1	Perbaikan	4.1 Perubahan sebelum dan sesudah implementasi smart city	4.1.1 Apakah sejak dilaksanakannya smart city di daerah Anda, sudah memberikan perbaikan bagi pelaksanaan proses pembangunan dan juga perbaikan di tengah-tengah masyarakat?	1,80
2	Keterlibatan Masyarakat	4.1 Peran serta masyarakat dalam program smart city	4.1.1 Apakah masyarakat sudah ikut berperan serta dalam pelaksanaan smart city di daerah Anda?	2,00

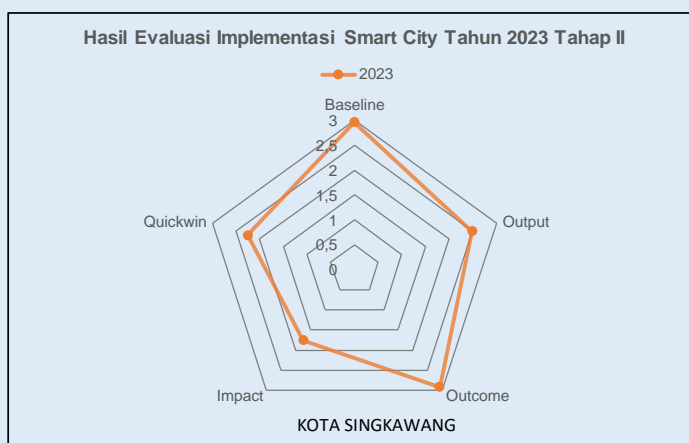
3	Keberlanjutan	4.1 Tindak lanjut Program Smart City	4.1.1 Apakah program program, kota cerdas smart city tahun lalu masih terus berjalan di tahun ini?	2,20
		4.2 Pelaksanaan program kota cerdas tahun berjalan	4.2.1 Apakah ada program yang baru yang dapat ditambahkan menjadi program kota cerdas (smart city) untuk tahun ini?	1,00
Rata-rata				1,75

E. Quick Wins

No	Indikator	Subindikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
1	Perumusan inovasi	5.1 Perumusan inovasi	5.1.1 Apakah inovasi quick wins dirancang dengan melibatkan seluruh pihak terkait smart city dan telah memperhatikan permasalahan strategis daerah? (permasalahan strategis daerah terdapat di dalam RPJMD)	3,40
2	Daya tarik inovasi	5.1 Daya tarik inovasi	5.1.1 Apakah inovasi quick wins yang dirancang memiliki daya tarik, baik untuk kalangan internal (warga lokal dan pemerintah daerah) maupun eksternal (masyarakat luar daerah)?	1,80
3	Manfaat inovasi	5.1 Manfaat inovasi	5.1.1 Sejauh mana inovasi quick wins yang dirancang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?	2,00
4	Keunikan inovasi	5.1 Keunikan inovasi	5.1.1 Apakah Inovasi quick wins yang dirancang mengandung keunikan atau ada unsur kreativitas di dalamnya?	1,60
5	Peluang kemitraan	5.1 Peluang kemitraan	5.1.1 Sejauh mana inovasi quick wins yang dirancang dapat membuka peluang kemitraan dengan pihak eksternal?	1,60

6	Potensi pengembangan	5.1 Potensi pengembangan	5.1.1 Sejauh mana inovasi quick wins memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan?	2,00
7	Keberlangsungan	5.1 Keberlangsungan	5.1.1 Apakah pemerintah daerah sudah memiliki strategi untuk menjaga keberlangsungan berjalannya inovasi quick wins?	2,80
8	Sumber daya	5.1 Sumber daya	5.1.1 Apakah sumber daya untuk mengembangkan dan menjalankan inovasi quick wins tersedia?	2,00
9	Manajemen Risiko	5.1 Identifikasi risiko	5.1.1 Sejauh mana pemerintah daerah sudah melakukan identifikasi risiko?	3,00
		5.2 Mitigasi risiko	5.2.1 Sejauh mana pemerintah daerah menyusun rencana mitigasi risiko?	2,20
10	Keberlanjutan	5.1 Keberlanjutan	5.1.1 Sejauh mana program quick wins smart city tahun lalu masih terus berjalan di tahun ini?	3,60
			5.1.2 Berapa banyak program quick wins smart city yang baru untuk tahun ini?	1,00
Rata-rata				2,25

Grafik Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2023



Kelemahan dan Kekuatan

KELEMAHAN

1. Hari Kusdaryanto, Citiasia:
 - a. Masih ada kebingungan dalam membedakan Peta Jalan (berisi program, kegiatan, inovasi) dan 4 bentuk Rencana Aksi pendukung (literasi, infrastruktur, SDM-kebijakan/kelembagaan, aplikasi) sebagaimana tertulis di Buku 2 Masterplan.
 - b. Masih rendahnya pencapaian outcome untuk beberapa indikator misalnya: akses air bersih, sanitasi, persentase stunting tertangani, balita imunisasi lengkap, dan cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan.
 - c. Masih ada sub-dimensi yang belum mempunyai inovasi, yakni: Smart Economy – Sub Dimensi Ekosistem Transaksi Keuangan Digital, Smart Living – Sub Dimensi Ekosistem Kesehatan, Smart Environment – Sub Dimensi Energi.
2. Dudi Hermawan, Kementerian Keuangan:
 - a. Belum memiliki peraturan walikota yang menjadi dasar hukum smart city.
 - b. Fungsi Dewan smart city belum berjalan baik.
3. Heri Sutrisno, Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi Indonesia:
 - a. Anggaran menjadi kendala implementasi program kota cerdas
 - b. Data pendukung kurang lengkap
 - c. Fungsi dewan dan pelaksana kota cerdas masih kurang
4. Lolly Amalia Abdullah, Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia:
 - a. Kelembagaan terutama Dewan Smart City belum berfungsi, karena payung hukum Smart City masih dalam Rancangan, sehingga merasa belum ada landasan hukum untuk mengundang pihak eksternal yang masuk dalam Dewan Smart City
 - b. Belum ada sub dimensi Economy Ekosistem Digital, sub dimensi Kesehatan untuk Ekosistem Kesehatan
5. Ulung Pribadi, Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:
 - a. Perlu menyediakan data pendukung yang kuat untuk mendukung rekomendasi yang diajukan. Data dan bukti konkret sangat penting untuk memvalidasi pernyataan dan memastikan keefektifan program-program Smart City.
 - b. Selain itu, cenderung bersifat umum dan kurang spesifik dalam menggambarkan implementasi program, sehingga menghilangkan kejelasan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana kolaborasi antar-pihak akan diatur.
 - c. Rekomendasi juga harus mencakup rincian konkret tentang penggunaan teknologi, rencana mitigasi risiko, dan langkah-langkah konkret yang akan diambil. Kesalahan ini dapat mengurangi efektivitas rekomendasi dan membuat pelaksanaan program Smart City menjadi kurang efisien dan efektif. Dalam merumuskan rekomendasi, diperlukan informasi yang lebih lengkap, konkret, dan terperinci untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan program Smart City.

KEKUATAN

1. Hari Kusdaryanto, Citiasia:
 - a. Sudah ada Perwako tentang Inovasi Daerah dan SK Walikota tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, selain SK Dewan Smart City dan SK Tim Pelaksana. Saat ini sedang merancang Perda Smart City.
 - b. Potensi kunjungan wisata yang tinggi, terutama menjadi destinasi utama perayaan Imlek – Cap Gomeh.
 - c. Sebagian besar program yang direncanakan di setiap dimensi sudah berjalan.
 - d. Sudah ada slogan branding “Pasti Ke Singkawang”.
 - e. Sudah mengidentifikasi quickwin baru di tiap-tiap dimensi.

2. Dudi Hermawan, Kementerian Keuangan:
 - a. Pelaksanaan program smart city di Kota Singkawang sudah berjalan baik: Masterplan yg disusun tahun 2022, berjalan 6 Quick Win (1005) Tahun 2023 Dari 19 Quick Win yang direncanakan, berjalan 18 (94,7 %).
 - b. Capaian Inovasi yang berjalan sebanyak 49 dari 56 Inovasi (87,5%).

3. Heri Sutrisno, Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi Indonesia:
 - a. Capaian pelaksanaan program kota cerdas > 75%
 - b. Ada anggaran 30% dari APBD untuk kota cerdas

4. Lolly Amalia Abdullah, Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia:
 - a. Sudah menggunakan PDN.
 - b. Kota Singkawang sudah tidak ada blank spot.
 - c. Wajar Tanpa Pengecualian.
 - d. Masuk dalam Kalender tahunan Nasional seperti Perayaan Cap Go Meh.
 - e. Upaya mengatasi Banjir, ketaatan pada RTRW dan kerjasama dengan BRIN untuk radar hujan terintegrasi dengan SANTNU yang dapat memberikan notifikasi kepada stakeholder (BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan KB, TNI/POLRI, Kecamatan dan Kelurahan).
 - f. Penyelesaian masalah pada program bedah rumah yaitu dengan sosialisasi dan penganggaran pada tahun 2024 SKT dan domisili warga.

5. Ulung Pribadi, Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:
 - a. Teruskan integrasi teknologi dan data, fokus pada IoT.
 - b. Evaluasi tahun lalu, alokasi APBD, sumber pembiayaan tambahan, dan tingkatkan transparansi.
 - c. Tingkatkan kinerja fiskal, komunikasi merek, dan evaluasi branding.
 - d. Sederhanakan prosedur, perkuat infrastruktur, promosikan investasi, dan kembangkan tenaga kerja.
 - e. Galakkan identitas kota di media sosial.
 - f. Program Smart Economy fokus pada teknologi, pendidikan, kerjasama.
 - g. Perlu program sosial efisien, pendidikan vokasional, lapangan kerja, dan dukungan usaha kecil.
 - h. Prioritaskan infrastruktur sanitasi, kesadaran, dan inovasi limbah.
 - i. Dukung fasilitas pendidikan, akses kesehatan, dan partisipasi keluarga.
 - j. Keberlanjutan, integrasi data, dan kerjasama lintas sektor kunci untuk kemajuan kota yang pintar.

Rekomendasi

1. Hari Kusdaryanto, Citiasia:
 - a. Mensosialisasikan Masterplan dan Hasil Evaluasi tahun 2023 kepada Dewan Smart City, Tim Pelaksana dan stakeholder terkait agar semangat dan komitmen menjalankan program tetap terjaga, dan mengantisipasi bila ada perubahan/rotasi di OPD. Termasuk agar pelaksanaan program dan renaksi tahun depan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
 - b. Evaluasi tahunan bertujuan mengecek pelaksanaan program, kegiatan, inovasi, rencana aksi dan quick wins yang sudah tertulis di dalam masterplan. Bila ada tambahan baru, perubahan, dipersilakan namun harus diinformasikan kepada Kementerian.
 - c. Inovasi berfokus kepada beberapa indikator outcome pembangunan yang masih rendah: sanitasi, akses air minum layak, persalinan ditangani tenaga medis, balita imunisasi lengkap, serta persentase stunting tertangani.
 - d. Melengkapi program/kegiatan/inovasi di setiap sub dimensi.
 - e. Mengembangkan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholder non pemerintah – termasuk dengan komunitas, sektor swasta termasuk UMKM, akademisi, dan media. Alternatif pembiayaan non APBD juga perlu direncanakan – melalui skema CSR, KPBU, dana DAK/K/L, atau dana hibah dari lembaga donor internasional.
 - f. Memastikan keempat bentuk rencana aksi dilengkapi dan dilaksanakan.

2. Dudi Hermawan, Kementerian Keuangan:

Perwali (saat sudah tersedia Rancangan Perwali) yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Smart City di Kota Singkawang agar segera diproses penetapannya.

3. Heri Sutrisno, Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi Indonesia:
 - a. Tingkatkan kemitraan kota cerdas.
 - b. Adanya program kota cerdas berkelanjutan.
 - c. Tingkatkan literasi digital.
 - d. Adanya program quick win berkelanjutan.

4. Lolly Amalia Abdullah, Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia:
 - a. Rancangan Peraturan Walikota sebagai payung Hukum Master Plan Smart City agar dapat segera diterbitkan.
 - b. Mengaktifkan Dewan Smart City untuk segera berfungsi melakukan Rapat Dewan Smart City yang membahas Pelaksanaan Smart City dengan mengundang semua Anggota Dewan Smart City termasuk non OPD seperti Perguruan Tinggi, Bisnis, Komunitas, Masyarakat dan Media. Dengan demikian Dewan Smart City dapat mengarahkan Tim Pelaksana dalam melaksanakan Master Plan Smart City, mengambil keputusan, berperan mengkoordinasikan Tim Pelaksana dan Forum Smart City, memastikan ketersediaan Anggaran, dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi.
 - c. Setiap tahun harus ada Quickwin baru dari setiap dimensi. Quick win baru dapat berupa pengembangan quick win lama.
 - d. Permintaan CSR Free Wifi kepada Operator Telekomunikasi untuk Desa Wisata.
 - e. Disarankan agar Raperda CSR dapat segera diterbitkan.

5. Ulung Pribadi, Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:
 - a. Pentingnya pengumpulan dan analisis data yang mendalam untuk mengidentifikasi masalah sebenarnya.
 - b. Menspesifikasikan langkah-langkah implementasi yang lebih rinci, termasuk teknologi yang akan digunakan, tanggung jawab yang jelas, dan jadwal yang terinci.
 - c. Alokasikan sumber daya secara bijak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan memprioritaskan proyek-proyek berdampak besar dan memiliki strategi mitigasi risiko yang kuat.
 - d. Dorong kerja sama erat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, organisasi non-profit, dan masyarakat.
 - e. Libatkan aktif masyarakat dalam seluruh proses program Smart City.
 - f. Pastikan transparansi dalam komunikasi dan evaluasi berkelanjutan untuk peningkatan berkelanjutan.
 - g. Utamakan kesuksesan jangka panjang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup, efisiensi, dan partisipasi masyarakat serta lingkungan. Rekomendasi ini akan memastikan program Smart City berjalan dengan lebih efisien, efektif, dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.